



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Proses penyusunan LAKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah kabupaten Sumba Tengah. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah media pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Dalam laporan akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja, sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 –2026.

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive.
6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat Pemerintah Daerah yang berprestasi.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk mengantisipasi perkembangan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah harus dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (**Weakness**) dan memanfaatkan kekuatan (**Strenght**) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan peluang (**Opportunity**) dan dapat mengatasi ancaman (**Threat**) yang mungkin terjadi. Dengan demikian posisi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dapat mengambil peran sesuai dengan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

C. Landasan Hukum

Dalam menyusun laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah memperhatikan berbagai peraturan perundang –undangan antara lain :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas i Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika

Laporan akuntabilitas kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yamnmng telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan domkumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah:

1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
2. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

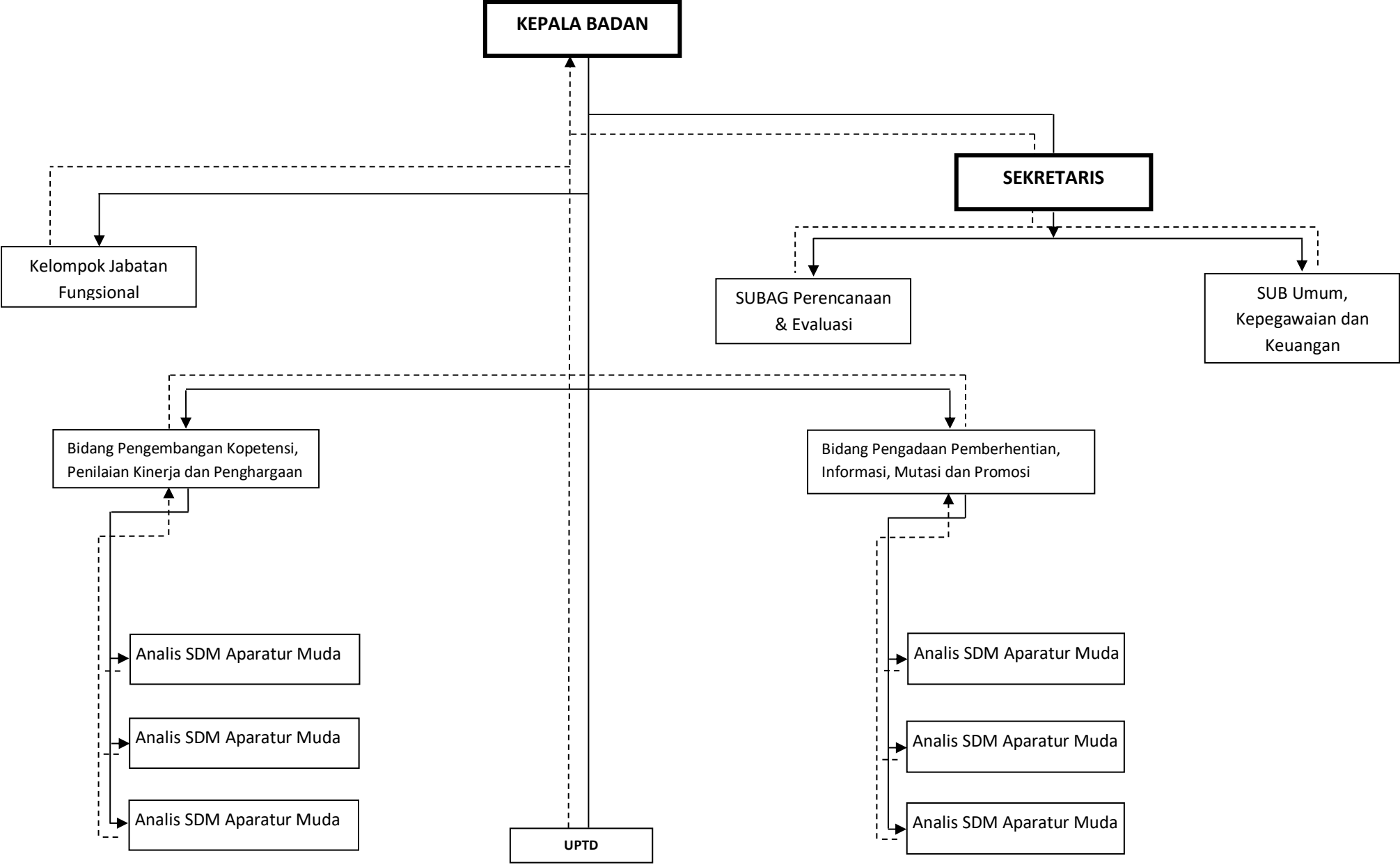
Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Bidang Pengembangan, Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, membawahkan 3 (tiga) sub bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan, Sertifikasi dan Diklat Teknis Fungsional;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. Sub Bidang Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
4. Bidang Pengadaan Pemberhentian, Informasi, Mutasi dan Promosi, membawahkan 3 (tiga) sub bidang yaitu:
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Sub Bidang Data Informasi dan Fasilitasi ASN; dan
 - c. Sub Bidang Mutasi Promosi, Pengembangan Karir dan Kepangkatan.

Sedangkan bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagaimana disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi



F. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam melaksanakan tugas membantu Bupati serta melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah mempunyai fungsi :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kondisi Pegawai

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah hingga akhir Desember 2024 memiliki pegawai sebanyak 31 orang sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Tabel 1.1

- a) Jumlah Pegawai

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	16
2	Perempuan	15
Jumlah		31

Tabel 1.2

- b) Jumlah Pegawai BKPSDMD menurut Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S1	D3	SLTA	
1	Laki-laki	10	5	1	16
2	Perempuan	10	4	1	15
Jumlah		20	9	2	31

Tabel 1.3

- c) Jumlah Pegawai BKPSDMD menurut pangkat dan golongan

No	Uraian	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Laki-laki	2	10	4	16
2	Perempuan	-	11	4	15
Jumlah		2	21	8	31

Tabel 1.4

- d) Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	Kepala Badan Eselon II B	1	0	1
2	Sekretaris Eselon III A	1	0	1
3	Kepala Bidang Eselon III B	1	1	2
4	Kepala Sub. Bagian Eselon IV A	1	1	2
5	Fungsional Tertentu	4	2	6

H. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel berikut ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi :

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana BKSDMD Tahun 2024

No	NAMA BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	KONDISI		
					B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MOBIL WORKSHOP	PHANTER/ISUZU (ED 1027 WD)	2008	1		V	
2	SEPEDA MOTOR	SUPRA FIT-X (ED 2026 WD)	2007	1		V	
3	SEPEDA MOTOR	MEGA PRO (ED 2039 JU)	2009	1			V
4	SEPEDA MOTOR	YAMAHA MX KING (ED 2495 WD)	2016	1	V		
5	SEPEDA MOTOR	SUPRA X 125 (ED 2517 WD)	2008	1	V		
6	SEPEDA MOTOR	MEGA PRO (ED 2494 WD)	2011	1			V
7	SEPEDA MOTOR	YAMAHA JUPITER (ED 2001 WD)	2017	1	V		
8	PROFIL TANK 3300 L	PLASTIK	2016	1	V		
9	SCANNER	BROTHER	2018	1	V		
10	SCANNER	EPSON	2019	2	V	V	
11	SCANNER	EPSON	2020	1	V		
12	LEMARI/RAK BUKU	RAK PANJANG	2016	4	V		
13	LEMARI PENYIMPANAN	LEMARI RAK PANJANG	2007	2	V		
14	LEMARI PENYIMPANAN	LEMARI RAK PANJANG	2012	4	V		

15	LEMARI PENYIMPANAN	LEMARI 2 PINTU	2008	1	V		
16	LEMARI PENYIMPANAN	2 PINTU	2012	4	V		
17	RAK KAYU	RAK KAYU	2009	4	V		
18	FILLING KABINET 5 LACI	LION	2016	2	V		
19	WHITE BOARD	WHITE BOARD	2008	1	V		
20	MESIN ABSENSI	STANDARLONE FACE RECONIGNITION SYSTEM	2016	1		V	
21	PAPAN PENGUMUMAN	LOKAL	2016	2	V		
21	KURSI BESI	METAL	2020	60	V		
22	MEJA PANJANG	KAYU	2016	4	V		
23	MEJA PANJANG	KAYU/TRIPLEKS	2020	6	V		
24	MEJA KERJA	½ BIRO	2007	11	V		
25	MEJA TULIS/MEJA KERJA	½ BIRO	2012	10	V		
26	KURSI PUTAR PIMPINAN	FANTASI	2008	1	V		
27	KURSI PUTAR	POLARIS	2016	8	V		
28	KURSI TUNGGU (4 DUDUKAN)	STAINLEES	2016	4	V		
29	MEJA KOMPUTER	LOKAL	2007	1	V		
30	MEJA KOMPUTER	KAYU/TRIPLEKS	2019	55	V		
31	MEJA KOMPUTER	PABRIK	2020	10	V		
32	SOFA	SUDUT BUSA	2009	1	V		
33	KURSI TAMU PEJABAT (SOFA BESAR)	BESI BUSA	2016	2	V		
33	KARPET LANTAI	PABRIK	2020	1	V		
34	MESIN PENGHISAP DEBU	PABRIK	2020	1	V		
35	AC WINDOW	AC SPLIT 2 PK	2019	2	V		
36	AC SPLIT	PANASONIC CU PC9OJ	2014	4	V		
37	AC SPLIT	LG	2018	1	V		
38	TELEVISI WARNA 32"	SAMSUNG LED. TV SERIES	2014	3	V		
39	TELEVISI	PABRIK	2020	1	V		
40	MICROPHONE	PABRIK	2020	1	V		
41	MICROPHONE FLOOR STAND	PABRIK	2020	2	V		
42	SANTAK BLAZER	PRO 1500 UPS	2019	45	V		
43	SANTAK CASTLE ONLINE	INTEL CORE	2019	1			FISIK TIDAK ADA
44	STABILISATOR	PRABIK	2020	1	V		
45	CAMERA VIDIO	CCTV	2014	1	V		
46	KURSI PUTAR PIMPINAN	KURSI PUTAR PIMPINAN	2009	1	V		
47	UPS	PROLINK PRO/850V	2018	4	V (1)		V (3)
48	UPS	PROLINK PRO/650V	2018	1	V		
49	UPS	CLIENT	2020	15	V		
50	PERALATAN STUDIO	BREAKET	2020	1	V		
51	INFOCUS	PABRIK	2018	1	V		
52	INFOCUS	PABRIK	2020	1	V		
53	SPEAKER AKTIVE	PABRIK	2020	3	V		
54	CCTV	PABRIK	2019	1	V		
55	MEJA KERJA	BIRO HORSE METAL	2008	1	V		
56	MEJA TULIS/MEJA KERJA	½ BIRO	2012	4	V		
57	GENERATOR SET	HONDA EG6500CXS	2014	1			V
58	CPU	HP	2018	1	V		
59	TERALI	BESI	2019	1	V		

60	INSTALASI JARINGAN	-	2020	1	V		
61	KOMPUTER PC UNIT	KOMPUTER PC	2011	4	V		
62	KOMPUTER PC	KOMPUTER LG	2012	3			V
63	KOMPUTER PC UNIT	RELION	2014	8			V
64	KOMPUTER PC UNIT	BENQ	2017	3	V (1)		V (2)
65	KOMPUTER PC UNIT	HP 20c317d	2018	2	V		
66	KOMPUTER PC UNIT	ASUS/ ALL IN ONE	2020	10	V		
67	LAPTOP	TOSHIBA	2012	1	V		
68	LAPTOP	ASUS	2016	4	V (2)		V (2)
69	LAPTOP	ACER	2017	2			V
70	LAPTOP	HP PAV bf 193 tx	2018	1		V	
71	DELL NOTEBOOK VOSTRO	1PS LED	2019	1		V	
72	HARDISK EKSTERNAL	SEAGETE 500 GB	2016	4	V (2)	V	V
73	HARDISK EKSTERNAL	SEAGETE 1 TERA	2016	1	V		
74	HARDISK INTERNAL	1 TB	2018	1	V		
75	MONITOR	HP V270	2019	1			V
76	PRINTER	HP LASER JET	2018	1	V		
77	PRINTER	CANON IP 2770	2012	1			V
78	PRINTER	PIXMA/MP287	2020	1			V
79	SERVER	HP/ DL180	2018	1	V		
80	SERVER	PROLIANT	2019	1	V		
81	MICROSOFT	WINDOWS SERVER	2019	8	V		
82	KOMPUTER PC UNIT	ASUS	2019	50	V (49)		V (1 FISIK TIDAK ADA)
83	NETWARE INTERFACE EXTERNAL	PABRIK	2019	1	V		
84	WIRELES ROUTER	ACCES POINT	2018	1	V		
85	MEJA ½ BIRO	LOKAL	2018	6	V		
86	KURSI PUTAR PIMPINAN	ERONA	2018	1	V		
87	KURSI PUTAR PEJABAT	ERONA	2018	3	V		
88	SOFA	LOKAL	2018	1 SET	V		
89	LAPTOP	ASUS	2016	1	V		
90	LAPTOP	ACER/ASPIRE E 14	2018	2	V		
91	PRINTER	CANON PIXMA	2018	2	V		
92	PRINTER	CANON	2016	1			V
93	INFOKUS	Benq MS506P/SMART ECO	2018	1	V		
94	KAMERA REGISTRASI PESERTA	HP 320 FDH WEBCAM	2024	2	V		
95	PRINTER	EPSON/ ECOTANK L3250	2024	1	V		
96	PERALATAN KOMPUTER	PERALATAN	2024	1	V		

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2024–2026

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional maupun global. Menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi Pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintahan untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai perumusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya Visi Kabupaten Sumba Tengah **“Sumba Tengah Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing.”**

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah ,hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana penyusunan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah.

Selaku pelaksana kebijakan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD. Semakin tinggi tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif melalui pengaturan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan

cepat.

Dengan proses yang teratur, terkendali dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan pelaporan akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagaimana Visi, Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan pencapaian Visi Misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hubungan misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Peningkatan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur melalui Pengembangan sumber daya aparatur.
- b. Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang berdisiplin, memiliki etos dan budaya kerja serta akuntabel.
- c. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya Peningkatan kompetensi, profesional dan integritas aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan substansi/teknis.
- b. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berdisiplin, memiliki etos dan budaya kerja serta akuntabel.
- c. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah

C. Kebijakan Strategis

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD dalam melaksanakan strategi mencapai tujuan renstra SKPD. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai sasaran, arah/tindakan yang diambil pemerintah kabupaten Sumba Tengah untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur.
- b. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya sebagai abdi negara dan masyarakat.
- c. Meningkatnya kesejahteraan aparatur daerah.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja/bidang dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Target capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 dapat dilihat dalam table 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan Serta Parsitipatif	Presentase jumlah pengadaan Pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif	Presentase	80%
		Jumlah ASN yang mendapat bantuan biaya Pendidikan Tugas Belajar	Orang	34 Orang
		Presentase ASN yang mengikuti Diklat	Presentase	85%
		Presentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	Presentase	85%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi (Perangkat Daerah)

Format laporan kinerja instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, sehingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvment).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori dengan dua jenis skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

1. Makna Positif

Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagaimana table 3.1.a

Tabel 3.1.a

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

Skor	Rentang capaian	Kategori capaian
4	Antara 96 sampai 100	Sangat berhasil
3	76% sampai 95%	Berhasil
2	56% sampai 75%	Cukup berhasil
1	Kurang dari 55%	Kurang/ tidak Berhasil

2. Makna Negatif

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negative, maka skala yang digunakan sebagaimana table 3.1.b

Tabel 3.1.b

Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

Skor	Rentang capaian	Kategori capaian
------	-----------------	------------------

1	Antara 91 sampai 100	Kurang
2	76% sampai 90%	Cukup
3	56% sampai 75%	Berhasil
4	Kurang dari 55%	Sangat berhasil

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1

Mewujudkan Pemerintahan daerah yang Berdisiplin memiliki Etos Kerja dan Budaya Akuntabel melalui Pengisian Jabatan Tinggi:

a. Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan manajemen kepegawaian yang profesional dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan substansi/teknis, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Table 3.2 sebagai berikut :

Table 3.2

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelaksanaan Diklat Sesuai dengan kebutuhan Diklat Kepemimpinan (%)	100%	100%	100%

Total Capaian	100%
---------------	------

- Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian Sasaran 1 mencapai 100% atau dengan Predikat Sangat Berhasil *melalui* Pelaksanaan Diklat Sesuai dengan kebutuhan Diklat Kepemimpinan sebagai berikut :

(1) PKN Tk. II

1. Pelatihan PKN Tingkat II secara *Blended Learning*, dilaksanakan selama 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) Jam Pelajaran atau setara dengan 107 (seratus tujuh) Hari Pelatihan.
2. Lokasi penyelenggaraan PKN Tk. II secara *Blended Learning* yaitu di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah (BKPSDMD), BKPSDMD Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi di Bandung.

(2) PKA

Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan sebagai berikut :

1. PKA secara *Blended Learning* dilaksanakan selama 908 (sembilan ratus delapan) Jam Pelajaran atau setara dengan 105 (seratus lima) hari pelatihan; dan
2. Lokasi penyelenggaraan PKA secara *Blended Learning* yaitu di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah (BKPSDMD) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKPSDMD) di Kupang.

(3) PKP

PKP dilaksanakan sebagai berikut :

1. PKP secara *Blended Learning* dilaksanakan selama 905 (sembilan ratus lima) Jam Pelajaran atau setara dengan 104 (seratus empat) hari pelatihan; dan Lokasi penyelenggaraan PKA secara *Blended Learning* yaitu di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah (BKPSDMD) dan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPSDMD) di
Kupang

- (4) Pendidikan, Pelatihan dan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kineja (PPPK)

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara Fasilitasi dengan bentuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terdiri atas :

1. Pelatihan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.; dan
2. Pelatihan non klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Penyelenggaraan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi PPPK dilaksanakan secara *Blended Learning* di Kabupaten Sumba Tengah selama 34 (tiga puluh empat) Jam Pelajaran dengan pola fasilitasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah (BKPSDMD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) NTT di Kupang

- Peserta

Tabel 3.3
Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
(PKP) berjumlah 8 orang,

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA
1	Evaristus H. Dabut, SE NIP.19831229 201001 1 028	Penata Tk. I - III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Rudi Umbu Lamik, S.Pi NIP.19870307 201403 1 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

3	Nurhayati Rambu Teba, SE NIP.19770504 200904 2 004	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada SETDA
4	Adi Candra Mudain, S.Pt NIP.19830405 201403 1 002	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Badan Kesatuan, Bangsa dan Politik
5	Umbu Saramony, ST NIP.19860715 201403 1 002	Penata - III/c	Kasubag Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Beny Max P. Rares, SP NIP.19840619 201403 1 001	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7	Benediktus Pawolung, S.Si NIP.19861106 201503 1 001	Penata - III/c	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Umbu Kappi Landu Awang, S.ST NIP.19880615 201101 1 006	Penata - III/c	Kepala UPTD	UPTD Mekanisasi Perbenihan dan POPT

Tabel 3.4
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) berjumlah 15 orang

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA
1	drh. Indra Praja Dendomesa, S.KH NIP.19830110 201001 1 022	Pembina - IV/a	KepalaKepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah
2	Neny Rambu Lawadjati, ST NIP.19870307 201403 1 004	Pembina - IV/a	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan
3	Bony Umbu Tara,S.Ip NIP. 19751013 200904 1 002	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Anderias K.Yani,SE NIP. 19751112 200904 1 002	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
5	Damaris Ladutana, S.Sos NIP.19710725 200804 2 001	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Pengawasan dan Kelembagaan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

6	Yanti Wiji Lestari, S.Kom NIP.19820729 200904 2 005	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dewiyanti Rambu Eda Dawi Ngana, S. Kom NIP.19870702 201101 2 012	Penata Tk.I- III/d	Kepala Bidang Peng Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
8	Umbu Janga Oli Praing, SE NIP.198012312011011010	Penata Tk.I- III/d	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
9	Ersy P.Rambu Awa,S.Sos NIP.19850712 200804 2 004	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Asih Supriyati, ST NIP.19770614 200903 2 005	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Pengolaan SDA, TTG dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Shanly Maliwenu, S.Pt NIP.19760514 200701 2 016	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Hari Prayogo,SE NIP.19850218 200804 1 001	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
13	Umbu Sawola, SP NIP.19730817 200604 1 011	Pembina - IV/a	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Daniel Wunu Sabatudung, SH NIP.19711205 201212 1 002	Penata Tk.I - III/d	Sekretaris Camat	Kecamatan Katiku Tana Selatan
15	Darius Dangu, ST NIP.19801223 201001 1 015	Penata Tk.I - III/d	Kabid Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel 3.5
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II berjumlah 5
orang Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
Tahun anggaran 2024.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA
1	Adri Umbu Raisi Sabaora, SH NIP.19750125 200501 1 007	Pembina	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah
2	Lukas Woli, SP NIP.19700809 200012 1 002	Pembina Utama Muda IV/c	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
3	Nyong Umbu Kalikit Pari, S. TAPI NIP.19680614 200012 1 008	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4	Ridho Djama Samani, S. KM, M.Sc NIP.19720606 199603 1 004	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan
5	Anse Umbu Turajanni, S. Sos NIP.19681101 200112 1 001	Pembina Tk.I - IV/b	Kepala Dinas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Widyaiswara/Instruktur

Widyaiswara di tentukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPSDMD Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi di Bandung.

Pejabat Struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPSDMD Semarang Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi di Bandung.

- Metode

Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dilaksanakan dengan metode *Blended*

Learning metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Istilah *blended learning* berasal dari dua kata, yaitu *blended* yang berarti campuran dan *learning* yang berarti pembelajaran.

- Biaya

Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024.

Biaya Kontribusi masing-masing Peserta :

1. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebesar Rp. 23. 480.000
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebesar Rp. 23.480.000
3. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II sebesar Rp. 35.500.000

Seluruh biaya Kontribusi di transfer ke rekening kas Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPSDMD Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara Fasilitas ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024.

- Penyelenggaraan

(1) Penyelenggara

Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Bpsdmd Semarang di Jawa Tengah dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi di Bandung.

(2) Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dan Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik.

- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Peserta Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II yang dinyatakan LULUS berdasarkan hasil evaluasi akhir Panitia Penyelenggara diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

2. Tujuan 2

Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur

a. Sasaran 2

Mewujudkan Peningkatan kompetensi, profesionalisme dan integritas Aparatur Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan

dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Sasaran 2 : Meningkatnya kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengisian Jabatan Pimpinan Administrasi (%)	100%	100%	100%
2	Presentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100%	100%
Total Capaian				100%

- Sasaran : dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran 2 mencapai 100% atau dengan predikat Sangat Berhasil. Terlaksananya rapat Baperjakat dan koordinasi lintas sektor serta adanya penyiapan data dan informasi ASN yang lengkap, benar dan akurat untuk acuan terbitnya SK Mutasi dan Promosi ASN pada Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan juga sosialisasi tentang disiplin Tenaga Non PNS berdasarkan surat edaran Bupati Sumba Tengah Nomor: BKPSDMD.80/375/53.17/III/2022 tentang Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Tenaga Non PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait penegakkan disiplin bagi PNS dan Tenaga Non PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di seluruh Puskesmas dan Kecamatan yang ada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- Melaksanakan Rapat bersama Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka pembahasan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sekaligus penjatuhan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.

3. Tujuan 3

Peningkat Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sasaran 3

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Daerah

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional	100%	100%	100%
2	Proporsi aparatur dengan kompetensi yang sesuai	100%	100%	100%
Total Capaian				100%

- Sasaran : dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran 3 mencapai 100% atau dengan predikat Sangat Berhasil. Hal ini merupakan upaya dari adanya Tim baperjakat dan koordinasi lintas sektor serta terlaksananya usul berkas mutasi dan promosi ASN. Terlaksananya pelantikan dan pengisian jabatan yang lowong, SK Mutasi yang tepat waktu dan fasilitasi ASN yang diangkat dalam jabatan Fungsional. Diberikannya Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas agar terciptanya ASN yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang pemerintahan. Terselenggaranya perekrutan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Prjanjian Kinerja Tenaga Guru dan Kesehatan.
- Dengan ini disampaikan data hasil dari Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah sebagai berikut:
- Terbentuknya Tim Baperjakat;
 - Terbitnya SK Baperjakat;
 - Terlaksananya Rapat Baperjakat 6 kali;
 - Terbentuknya Tim Baperjakat
 - Terbitnya SK Baperjakat
 - Terlaksananya Rapat Baperjakat 4 kali

Dengan ini disampaikan data pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah diberikan pada tahun 2024:

a) Tugas Belajar

1. Rincian biaya untuk semester I tahun 2024

NO	NAMA / NIP	JURUSAN	TEMPAT KULIAH	BESARAN BIAYA
1	dr. Inriyani Rambu Kareri Emu NIP.19900418 201704 2 004	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	Universitas Padjadjaran	-
2	Yunita Fitriah, S.KM NIP.19870604 201503 2 001	S2 Kebidanan dan Manajemen Kesehatan	Universitas Gajah Mada Yogyakarta	-
3	Erna Bangi Reha NIP.19820717 201001 2 041	S1 Akuntansi	Universitas Warmadewa Denpasar	Tidak Dibiayai Lagi
4	Adriana R. Jola Pedi NIP.19870808 201001 2 032	S1 Ilmu Komunikasi	Universitas Nusa Cendana Kupang	Tidak Dibiayai Lagi
5	Yapet Taruklingga NIP.19870210 201001 1 020	S1 Teknik Sipil	Universitas Warmadewa Denpasar	Tidak Dibiayai Lagi
6	Nahason N. Walang, A.Md.,Kep NIP.19891112 201403 1 009	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
7	Yoan H.U.S. Palabu, A.Md NIP. 19880611 201001 1 002	S1 Manajemen	Universita Wirawacana Sumba	Rp10.000.000 /Semester
8	Elisantri R.S.E. Lika, A.Md.,Keb NIP.19831123 200604 2 011	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
9	Yublina R. Mbali Idi, A.Md.,Keb NIP.19780606 200604 2 050	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
10	Daud Data Mawi, A.Md.,Kep NIP.19810318 200112 1 001	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
11	Anggriani I. Natara, A.Md.,Kep NIP.19840406 200904 2 005	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
12	Enjelita Sihombing, A.Md.,Kep NIP.19860910 201001 2 046	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
13	Joni Rada Praing, A.Md.,Kep NIP.19841102 200904 1 006	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
14	Paulina R. Ndwu, A.Md.,Kep NIP.19800405 200501 2 027	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
15	Sofiah R. Ana Hida, A.Md.,Keb NIP.19800922 200701 2 015	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
16	Abdul Malik, AMKL NIP.19811120 200904 1 002	S1 Terapan RPL Sanitasi Lingkungan	Poteles Kemenkes Yogyakarta	-
17	Justi Seltiani Meta, A.Md.,Keb NIP.19910601 201704 2 004	S1 Kebidanan + Profesi	Poteles Kemenkes Semarang	-
18	Marini Sartika Nafi, A.Md.,Keb NIP.19910313 201704 2 002	S1 Kebidanan + Profesi	Poteles Kemenkes Semarang	-
19	Medo Melyani Bombo, A.Md.,Kep NIP.19930511 201903 2 005	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
20	Mega Amaliah, A.Md.,Kep NIP.19941124 201903 2 004	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
21	Satriani R. Tagu Duni, S.Pd NIP.19910911 202012 2 020	Magister Pendidikan Kimia	Universitas Negeri Yogyakarta	-
22	Silvia Febrieni Puspitasari, S.Fis NIP.19940217 201903 2 008	Profesi Fisioterapi	Universitas Udayana Denpasar	-

2. Rincian biaya untuk semester II tahun 2024 :

NO	N A M A / N I P	JURUSAN	TEMPAT KULIAH	BESARAN BIAYA
1	dr. Inriyani Rambu Kareri Emu NIP.19900418 201704 2 004	Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak	Universtas Padjadjaran	-
2	Nahason N. Walang, A.Md.,Kep NIP.19891112 201403 1 009	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
3	Yoan H.U.S. Palabu, A.Md NIP. 19880611 201001 1 002	S1 Manajemen	Universita Wirawacana Sumba	Rp10.000.000 /Semester
4	Elisantri R.S.E. Lika, A.Md.,Keb NIP.19831123 200604 2 011	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
5	Yublina R. Mbali Idi, A.Md.,Keb NIP.19780606 200604 2 050	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
6	Daud Data Mawi, A.Md.,Kep NIP.19810318 200112 1 001	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
7	Anggriani I. Natara, A.Md.,Kep NIP.19840406 200904 2 005	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
8	Enjelita Sihombing, A.Md.,Kep NIP.19860910 201001 2 046	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
9	Joni Rada Praing, A.Md.,Kep NIP.19841102 200904 1 006	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
10	Paulina R. Ndawu, A.Md.,Kep NIP.19800405 200501 2 027	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
11	Sofiah R. Ana Hida, A.Md.,Keb NIP.19800922 200701 2 015	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
12	Abdul Malik, AMKL NIP.19811120 200904 1 002	S1 Terapan RPL Sanitasi Lingkungan	Poteles Kemenkes Yogyakarta	-
13	Justi Seltiani Meta, A.Md.,Keb NIP.19910601 201704 2 004	S1 Kebidanan + Profesi	Poteles Kemenkes Semarang	-
14	Marini Sartika Nafi, A.Md.,Keb NIP.19910313 201704 2 002	S1 Kebidanan + Profesi	Poteles Kemenkes Semarang	-
15	Medo Melyani Bombo, A.Md.,Kep NIP.19930511 201903 2 005	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
16	Mega Amaliah, A.Md.,Kep NIP.19941124 201903 2 004	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
17	Satriani R. Tagu Duni, S.Pd NIP.19910911 202012 2 020	Magister Pendidikan Kimia	Universitas Negeri Yogyakarta	-
18	Silvia Febrieni Puspitasari, S.Fis NIP.19940217 201903 2 008	Profesi Fisioterapi	Universitas Udayana Denpasar	-
19	Desniyani R. Bagi Roni, A.Md RMK NIP.19961231 201903 2 003	D-IV Rekam Medik	Politeknik Kesehatan Kartini Bali	Rp10.000.000 /Semester
20	Zulkarnain Lay, A.Md NIP.19870524 201903 1 004	S1 Teknik Sipil	Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang	Rp10.000.000 /Semester
21	Polan Jhon Solumodok, A.Md NIP.19860407 201903 1 001	S1 Teknik Sipil	Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang	Rp10.000.000 /Semester
22	Yosua Umbu Datu, A.Md NIP.19860402 201903 1 001	S1 Teknik Sipil	Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang	Rp10.000.000 /Semester
23	Adningsih Rambu Woji, S.Tr.,Keb NIP.19871211 201101 2 003	Profesi Kebidanan	Universitas Kediri	Rp10.000.000 /Semester
24	Irene I.S. Wudu, A.Md.,Keb	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Kediri	Rp10.000.000 /Semester
25	Ratna Wati Seri Jala, S.Pd.,Gr NIP.19920527 201903 2 004	S2 Teknologi Pembelajaran	Universitas Negeri Yogyakarta	-
26	Theresia Rada Willu, A.Md.,Keb NIP.19930617 201903 2 005	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
27	Nur Asia Jumma, A.Md NIP.19880722 20094 2 001	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
28	Fransiska Koriati Jiman, A.Md NIP.19880416 200904 2 002	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
29	Apriyanti Rambu Ngana, A.Md.,Kep NIP.19940423 201403 2 001	S1 Keperawatan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
30	Rambu Nurul Siam NIP.19940228 201903 2 006	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	-
31	Yuni Yanti, A.Md.,Keb NIP.19890610 201403 2 004	S1 Kebidanan + Profesi	Poltekes Kemenkes Semarang	-

32	Marlena Trywulandari Lede, A.Md.,Keb NIP.19930329 201903 2 005	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	
33	Desi Rambu Leki Nguju, A.Md.,Keb NIP.19940727 201903 2 010	S1 Kebidanan + Profesi	Universitas Airlangga Surabaya	
34	Ida Zullaida, A.Md.,Ak NIP.19870804201403 2 005	DIV Analis Kesehatan	Poltekes Kemenkes Yogyakarta	
35	Nicolas M. Umbu Dondoe, A.Md.,Kep NIP.19870804201403 2 005	S1 Keperawatan + Profesi	STIKES Nusantara Kupang	

**TOTAL BIAYA TUGAS BELAJAR SEMESTER II TAHUN 2024 SEBESAR Rp.
70.000.000**

b. Ikatan Dinas

1. Rincian biaya untuk semester I tahun 2024:

NO	NAMA	JURUSAN	BESARAN BIAYA
1	Grandyo D. L. Umbu Nombu	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta	15.000.000 / SEMESTER
2	Rizky Alfredo U. D. Yewa	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	INTRENSIP
3	Cintya Claudia R. Eda Ridja	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	INTRENSIP
4	Rambu Bangi Lokat	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
5	Imanuel Gawi Mesang	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Maranatha Bandung	15.000.000 / SEMESTER
6	Gebriela Canthika Rambu Teba	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
7	Gilberth Umbu Kaledi Sagabulang	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
8	Rambu Ana Toya	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	15.000.000 / SEMESTER
9	Edgar Priambudi Pulupina	Kedokteran Umum pada Universitas Duta Wacana Jogjakarta	15.000.000 / SEMESTER
10	Yuliani Maryanti Wodha Rassy	Kedokteran Umum pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	15.000.000 / SEMESTER

11	Tiffany Rambu Leki Atarabu	Kedokteran Umum pada Unika Soegijapranata Semarang	15.000.000 / SEMESTER
12	Reynaldy Ubu Anagoga	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
13	Jannet Griselda Deby Pulupina	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
14	Maria Amelia Rambu Emu Sili Wolu	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
15	Fransiska Paula Piko	Kedokteran Gigi pada Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri	15.000.000 / SEMESTER
16	Mathelda Maharani Nunu	Kedokteran Gigi pada Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri	15.000.000 / SEMESTER
17	Danial Umbu Tara Dapamudang	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	15.000.000 / SEMESTER
18	Jacky Umbu Hula	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Maranatha Bandung	15.000.000 / SEMESTER
19	Jeremias Awang Bagas Sabawali	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
20	Gladys Pricilia Mempun Dase	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	15.000.000 / SEMESTER
21	Aliefa Sansabila Putri Sandewi	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER

TOTAL BIAYA IKATAN DINAS KEDOKTERAN SEMESTER I TAHUN 2024
SEBESAR Rp. 285.000.000

2. Rincian biaya untuk semester II tahun 2023

NO	NAMA	JURUSAN	BESARAN BIAYA
1	Grandyo D. L. Umbu Nombu	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta	CO-ASS
2	Rizky Alfredo U. D. Yewa	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	INTRENSIP
3	Cintya Claudia R. Eda Ridja	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	INTRENSIP

4	Rambu Bangi Lokat	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
5	Imanuel Gawi Mesang	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Maranatha Bandung	15.000.000 / SEMESTER
6	Gebriela Canthika Rambu Teba	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	-
7	Gilberth Umbu Kaledi Sagabulang	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
8	Rambu Ana Toya	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	15.000.000 / SEMESTER
9	Edgar Priambudi Pulupina	Kedokteran Umum pada Universitas Duta Wacana Jogjakarta	15.000.000 / SEMESTER
10	Yuliani Maryanti Wodha Rassy	Kedokteran Umum pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	15.000.000 / SEMESTER
11	Tiffany Rambu Leki Atarabu	Kedokteran Umum pada Unika Soegijapranata Semarang	15.000.000 / SEMESTER
12	Reynaldy Ubu Anagoga	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
13	Jannet Griselda Deby Pulupina	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
14	Maria Amelia Rambu Emu Sili Wolu	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
15	Fransiska Paula Piko	Kedokteran Gigi pada Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri	15.000.000 / SEMESTER
16	Mathelda Maharani Nunu	Kedokteran Gigi pada Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri	15.000.000 / SEMESTER
17	Danial Umbu Tara Dapamudang	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	15.000.000 / SEMESTER
18	Jacky Umbu Hula	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Maranatha Bandung	15.000.000 / SEMESTER
19	Jeremias Awang Bagas Sabawali	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER

20	Gladys Pricilia Mempun Dase	Kedokteran Umum pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta	15.000.000 / SEMESTER
21	Aliefa Sansabila Putri Sandewi	Kedokteran Umum pada Universitas Nusa Cendana Kupang	15.000.000 / SEMESTER
22	Marianus Adventino Krae Dey Fa	Kedokteran Umum pada Universitas Surabaya	15.000.000 / SEMESTER

**TOTAL BIAYA IKATAN DINAS KEDOKTERAN SEMESTER II TAHUN 2024 SEBESAR
Rp. 270.000.000**

c. Ijin Belajar

1. Semester satu (I)

NO	N A M A / N I P	JURUSAN	TEMPAT KULIAH	UNIT KERJA	SUMBER DANA
1	HERMANUS JEFRY TALU OLY, A.Md 19810428 200804 1 002	SI - MANAJEMEN	UNIVERSITAS TERBUKA	BKPSDMD	MANDIRI
2	DOMINIKA TAMU INA, A.Md 19800730 199903 2 002	SI - MANAJEMEN	UNIVERSITAS TERBUKA	BKPSDMD	MANDIRI
3	PRESLEY SURYA MACHO MBUIK 19890502 201001 1 002	SI - ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN KATIKUTANA	MANDIRI
4	UMBU YAGU BOLU, A. Md 19770427 200904 1 002	SI - ILMU HUKUM	UNIVERSITAS TERBUKA	INSPEKTORAT	MANDIRI
5	HIWA JURU MANA, A.Md 19750111 200604 1 009	SI-AGRIBISNIS PERIKANAN	UNIVERSITAS TERBUKA	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	MANDIRI
6	YERMIAS YOSEF DA SILVA, A. Md 19890115 202012 1 008	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
7	DOMINGGUS NDARA TANGGU HOLO, A. Md 19850626 202012 1 006	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
8	DAKAPAS KISNO MALIGOMANG, A.Md 19750111 200604 1 009	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
9	EMILIA JEMUMU, A. Md 19930527 202012 2 021	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI

10	MEGAYANTI FEOH, A. Md 19901002 202012 2 016	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
11	NENINGSIH S. YOHANIS, A. Md 19891101 202012 2 012	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
12	YOHANA BULU DADI 19840709 201101 2 012	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
13	AGUS NDEKALURU 19780822 201001 1 010	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
14	MARTHINUS SEPA, A. Md 19810516 201001 1 016	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
15	SAMUEL SEPA 19760923 199903 1 003	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
16	DOMINGGUS NGELU WALANGARA 19801215 201001 1 024	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
17	ADI UMBU TANDA KUDU, A Md 19890314 202203 1 003	SI-AGRIBISNIS PETERNAKAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PETERNAKA N	MANDIRI
18	LORINCE DJAMI 19810827 201001 2 022	S I - EKONOMI MANAJEMEN	UNIVERSITAS TERBUKA	BADAN KEUANGAN DAERAH	MANDIRI

2. Semester Dua (II)

NO	N A M A / N I P	JURUSAN	TEMPAT KULIAH	UNIT KERJA	SUMBER DANA
1	HERMANUS JEFREY TALU OLY, A.Md 19810428 200804 1 002	S I - MANAJEMEN	UNIVERSITAS TERBUKA	BKPSDMD	MANDIRI
2	DOMINIK TAMU INA, A.Md 19800730 199903 2 002	S I - MANAJEMEN	UNIVERSITAS TERBUKA	BKPSDMD	MANDIRI
3	PRESLEY SURYA MACHO MBUIK 19890502 201001 1 002	SI - ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN KATIKUTANA	MANDIRI

4	UMBU YAGU BOLU, A. Md 19770427 200904 1 002	SI - ILMU HUKUM	UNIVERSITAS TERBUKA	INSPEKTORA T	MANDIRI
5	HIWA JURU MANA, A.Md 19750111 200604 1 009	SI-AGRIBISNIS PERIKANAN	UNIVERSITAS TERBUKA	BAGIAN ADMINISTRAS I PEMBANGUN AN	MANDIRI
6	YERMIAS YOSEF DA SILVA, A. Md 19890115 202012 1 008	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
7	DOMINGGUS NDARA TANGGU HOLO, A. Md 19850626 202012 1 006	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
8	DAKAPAS KISNO MALIGOMANG, A.Md 19750111 200604 1 009	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
9	EMILIA JEMUMU, A. Md 19930527 202012 2 021	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
10	MEGAYANTI FEOH, A. Md 19901002 202012 2 016	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
11	NENINGSIH S. YOHANIS, A. Md 19891101 202012 2 012	SI-AGRIBISNIS PERTANIAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MANDIRI
12	YOHANA BULU DADI 19840709 201101 2 012	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
13	AGUS NDEKALURU 19780822 201001 1 010	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
14	MARTHINUS SEPA, A. Md 19810516 201001 1 016	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
15	SAMUEL SEPA 19760923 199903 1 003	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
16	DOMINGGUS NGELU WALANGARA 19801215 201001 1 024	SI-ILMU PEMERINTAHAN	UNIVERSITAS TERBUKA	KECAMATAN MAMBORO	MANDIRI
17	ADI UMBU TANDA KUDU, A Md	SI-AGRIBISNIS PETERNAKAN	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PETERNAKAN	MANDIRI

	19890314 202203 1 003				
18	LORINCE DJAMI 19810827 201001 2 022	S I - EKONOMI MANAJEMEN	UNIVERSITAS TERBUKA	BADAN KEUANGAN DAERAH	MANDIRI
19	GEORGE RONA MANAFE, A.Md 19881215 202203 1 001	S I - ILMU KOMUNIKASI	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A	MANDIRI
20	RICKY R. KANATALO 19901007 201001 1 001	S I - SOSIOLOGI	UNIVERSITAS TERBUKA	DINAS PETERNAKAN	MANDIRI

d. Pengadaan dan Pelaksanaan CASN Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketersediaan anggaran Penjabat Bupati Sumba Tengah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 Mei 2024 pengusulan formasi sejumlah 2. 883, yang terdiri dari:

- CPNS sebanyak 1595 formasi
 - CPNS Teknis sejumlah : 1561
 - CPNS Tenaga Kesehatan : 34
 - CPNS Guru : 0
- PPPK sebanyak 1288 formasi.
 - PPPK Teknis : 751
 - PPPK Kesehatan : 253
 - PPPK Guru : 284
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah tahun anggaran 2024 tanggal 2 juli 2024.
- Keputusan Bupati Sumba Tengah No BKPSDMD. 800/981/53.17/VIII/2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Formasi Tahun Anggaran 2024 Tanggal 14 Agustus 2024
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor BKPSDMD. 800/1931/53.17/IX/2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumaba Tengah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Pengumuman Seleksi CPNS Nomor BKPSDMD. 800/1009/53.17/VIII/2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024. (*Titik Lokasi Sumba Barat*)

No.	Formasi	Pendaftar	Formasi kosong	Lulus pasinggrade (SKD)
1	Teknis : 1561	8.206	465	441
2	Tenaga Kesehatan: 34	53	22	2
3	Guru : 0	-	-	-
Total		8.259	487	443

B. REALISASI KEUANGAN

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pada APBD tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan Anggaran Belanja pada Perubahan Anggaran Sebesar **Rp. 10.302.968.722,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.942.605.614,-** atau sebesar 67%, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp. 4.866.235.762** dan terealisasi sebesar **Rp. 1861995743** atau sebesar 38%, belanja barang dan jasa **Rp.4.845.632.960** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.504.509.871** atau sebesar 93% dan belanja bantuan sosial sebesar **Rp. 591.100.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.576.100.000,-** atau sebesar 97%..

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program yang dilaksanakan dalam 10 kegiatan yang mengarah pada 3 sasaran strategis dalam kerangka pelaksanaan pencapaian visi.

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	J E N I S B E L A N J A												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI				BARANG DAN JASA				BELANJA BANTUAN SOSIAL					TOTAL REALISASI		
		JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI				KEUANGAN	FISIK	
			KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
			Rp.	%	%		Rp.	%	%		Rp.	%	%				Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BELANJA DAERAH																
5,2	BELANJA LANGSUNG													10.302.968.722			
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.866.235.762	1.861.995.743	38%	38%	324.628.900	322.635.287	99%	99%	-	-			5.190.864.662	2.184.631.030	42%	42%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	###	####	5.000.000	4.999.000			-	-			5.000.000	4.999.000	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000	4.999.000	100%	100%					5.000.000	4.999.000	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.851.835.762	1.848.345.743	38%	38%	5.000.000	5.000.000			-	-			4.856.835.762	1.853.345.743	38%	38%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.851.835.762	1.848.345.743	38%	38%									4.851.835.762	1.848.345.743	38%	38%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000	5.000.000	100%	100%					5.000.000	5.000.000	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			149.999.780	149.821.120	100%	100%	-	-			149.999.780	149.821.120	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000	15.000.000	100%	100%					15.000.000	15.000.000	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000	10.000.000	100%	100%					10.000.000	10.000.000	100%	100%
	Penyediaan Bahan/Material					24.999.780	24.999.780	100%	100%					24.999.780	24.999.780	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000	99.821.340	100%	100%					100.000.000	99.821.340	100%	100%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.400.000	11.400.000	100%	100%	35.400.000	35.009.822	99%	99%	-	-			46.800.000	46.409.822	99%	99%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					31.800.000	31.409.822	99%	99%					31.800.000	31.409.822	99%	99%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.400.000	11.400.000	100%	100%	3.600.000	3.600.000	100%	100%					15.000.000	15.000.000	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	2.250.000	75%	75%	129.229.120	127.805.345	99%	99%	-	-			132.229.120	130.055.345	98%	98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					78.729.560	77.305.785	98%	98%					78.729.560	77.305.785	98%	98%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.250.000	75%	75%	50.499.560	50.499.560	100%	100%					53.499.560	52.749.560	99%	99%
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			1.382.718.500	1.296.008.711	94%	94%	591.100.000	576.100.000			1.973.818.500	1.872.108.711	95%	95%
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			796.429.000	755.694.356	95%	95%	21.100.000	21.100.000	100%	100%	817.529.000	776.794.356	95%	95%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					656.100.000	618.552.080	94%	94%	21.100.000	21.100.000	100%	100%	677.200.000	639.652.080	94%	94%
	Evaluasi Pemberhentian ASN					59.936.000	56.873.276	95%	95%					59.936.000	56.873.276	95%	95%
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					40.785.000	40.699.000	100%	100%					40.785.000	40.699.000	100%	100%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					39.608.000	39.570.000	100%	100%					39.608.000	39.570.000	100%	100%

	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			313.664.500	290.192.091	93%	93%	-	-			313.664.500	290.192.091	93%	93%
	Pengelolaan Mutasi ASN					90.590.000	80.633.000	89%	89%					90.590.000	80.633.000	89%	89%
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					84.385.000	84.272.570	100%	100%					84.385.000	84.272.570	100%	100%
	Pengelolaan Promosi ASN					138.689.500	125.286.521	90%	90%					138.689.500	125.286.521	90%	90%
	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			140.295.000	130.249.000	93%	93%	570.000.000	555.000.000	97%	97%	710.295.000	685.249.000	96%	96%
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					140.295.000	130.249.000	93%	93%	570.000.000	555.000.000	97%	97%	710.295.000	685.249.000	96%	96%
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			132.330.000	119.873.264	91%	91%	-	-	-	-	132.330.000	119.873.264	91%	91%
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					50.970.000	45.187.000	89%	89%	-	-	-	-	50.970.000	45.187.000	89%	89%
	Evaluasi Pelaksanaan Pembertan Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur					18.865.000	17.117.864	91%	91%			-	-	18.865.000	17.117.864	91%	91%
	Evaluasi Disiplin ASN					62.495.000	57.568.400	92%	92%			-	-	62.495.000	57.568.400	92%	92%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			3.138.285.560	2.885.865.873	92%	92%	-	-			3.138.285.560	2.885.865.873	92%	92%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			3.138.285.560	2.885.865.873	92%	92%	-	-			3.138.285.560	2.885.865.873	92%	92%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan					3.138.285.560	2.885.865.873	92%	92%					3.138.285.560	2.885.865.873	92%	92%
	JUMLAH	4.866.235.762	1.861.995.743	38%	38%	4.845.632.960	4.504.509.871	93%	93%	591.100.000	576.100.000	97%	97%	10.302.968.722	6.942.605.614	67%	67%

C. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN PENINGKATAN TARGET

1. Melakukan analisa kebutuhan diklat untuk mengetahui kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi PNS di Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan yang baik dengan instansi terkait (BKN, PT.Taspen, BKD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian PAN dan RB)
3. Sosialisasi perundang-undangan kepegawaian yang baru.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya perwujudan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengoptimalisasi peran dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan visi Kabupaten Sumba Tengah menjadi Kabupaten yang **“SUMBA TENGAH SEJAHTERA, BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING.”**

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh sasaran dan indikator yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa output maupun outcome dari indikator-indikator tersebut.

Persentase capaian kinerja atas indikator sasaran melalui penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal Tahun 2024 dari hasil tersebut terdapat capaian rata-rata 90%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran pada Tahun 2024 dari total pagu **Rp.10.302.968.722,-** dan terserap untuk operasional sebesar **Rp.6.942.605.614,-** atau **67%** sisa dana **Rp.3.360.363.180,-**.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2024 adalah antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tatakelola pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan AKIP

tatanan SAKIP secara lebih komprehensif dibidang kepegawaian. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah antar lain :

1. Masih ada kebijakan dan regulasi pusat yang belum sinergis dengan baik dalam penetapan maupun pengaturannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasinya di daerah.
2. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
3. Kualitas SDM belum memenuhi standart kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pengevaluasian kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi dan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

B. LANGKAH STRATEGIS

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antar lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemerintah pusat

berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.

2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui koordinasi internal kinerja atas program kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai contoh bagi SKPD.
3. Meningkatkan kualitas SDM Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian laporan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2024.

Waibakul, 10 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH**



CHARLES N. U. G. SABARUA, SE

Pembina Tk.I - IV/b

NIP.19771108 201001 1 009